

MEMBIDIK ARUS GLOBALISASI DARI PERSPEKTIF IDIOLOGI INDONESIA

Oleh: I Made Priana¹

Abstract

This paper tries to explain globalisation in light of Indonesian ideology as contained in the Pancasila. Having grasped the current of globalisation informed by the values of Pancasila, we must drive the current of globalisation in keeping with the spirit of Indonesia. In other words, the identity and values of Indonesia must inform and drive globalisation. The ideology of Indonesia has to become the soul of globalisation. Globalisation without the spirit of Indonesia will not help us to reach the goals of our Nation, the wellbeing of Indonesian. On the contrary, globalisation informed by the spirit of Indonesia will help us to embody the aim of our Nation, which is the wellbeing of all Indonesians.

Keywords: globalisation, Indonesia, Pancasila, Ideology

Pendahuluan

Istilah *globalisasi* biasanya hanya dianggap berkaitan dengan perekonomian. Tetapi sebenarnya globalisasi bukan hanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi saja. Seperti yang ditunjukkan oleh akar kata tersebut, globalisasi adalah hubungan global, hubungan yang mencakup seluruh dunia, tentang transformasi ruang dan waktu dalam kehidupan kita. Peristiwa di tempat yang jauh, entah yang berkaitan dengan ekonomi atau tidak, mempengaruhi kita secara lebih langsung dan segera daripada yang pernah terjadi sebelumnya. Sebaliknya, keputusan yang kita ambil sebagai individu individu, sering kali memiliki implikasi implikasi global. Kebiasaan makan masing-masing individu, misalnya, mempengaruhi para produsen makanan, yang mungkin hidup di sisi lain dunia ini².

Globalisasi Dalam Terang Pancasila

Revolusi komunikasi dan penyebaran teknologi informasi memang sangat berkaitan erat dengan arus dan proses globalisasi. Tentu hal ini juga sangat berlaku dalam

¹I made Priana adalah dosen tetap program pasca Sarjana STTNI Yogyakarta. Ia mendapat gelar Sarjana Teologia dari Universitas Kristen Duta Wacana pada tahun 1984, dan mendapat gelar Magister Teologi di Universitas yang sama pada tahun 1998. Pada saat ini, I made Priana sedang menempuh pendidikan Doktor Teologi di Universitas Satya Wacana, Salatiga.

²Anthony Giddens, *Jalan Ketiga, Pembaruan Demokrasi Sosial* (Jakarta : Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), 32 - 35

arena ekonomi. Pasar uang yang bergerak dua puluh empat jam sehari, bergantung pada gabungan teknologi satelit dan komputer yang juga mempengaruhi banyak aspek kemasyarakatan lainnya. Dunia dengan komunikasi elektronik yang seketika, dimana semua masyarakat termasuk masyarakat yang berada dalam wilayah termiskin pun terlibat, telah sangat mengguncang institusi institusi local dan pola kehidupan sehari hari. Sebagaimana dampak televisi begitu besar, demikianlah dampak revolusi komunikasi dan penyebaran teknologi informasi dalam proses globalisasi telah mendatangkan pengaruh yang dahsyat bagi masyarakat³. Globalisasi menciptakan wilayah ekonomi dan cultural baru, yang kadang kala melintasi batas batas Negara dan bangsa. Kekuatan Negara dan kedaulatan rakyat dalam manajemen ekonomi sangat diperlemah oleh arus dan proses globalisasi⁴. Globalisasi bisa berdampak seperti itu, karena globalisasi itu, menurut Anthony Giddens, sangat dijiwai oleh konsep atau pemahaman bahwa setiap orang harus diberi cukup ruang bagi kebebasan personal. Karena roh dari globalisasi itu demikian adanya, maka arus dan proses globalisasi selalu berkarakter memberi penekanan yang lebih besar pada kebebasan individual yang berorientasi pada kepentingan diri, dan mengabaikan rasa kepedulian terhadap public, seraya menghancurkan bahkan mematikan asas atau nilai kesetaraan⁵.

Munculnya arus dan proses globalisasi yang berwajah dan bermetode seperti tergambar di atas, dalam tatanan kehidupan manusia memang tidak dapat terbantahkan lagi. Menurut Mohammad Takdir Ilahi, arus dan pengaruh globalisasi, tidak mungkin bisa dibendung, karena globalisasi yang sebenarnya adalah kolonialisme berwajah baru, demikian tulis Mohammad Takdir Ilahi, *tengah bersetubuh dengan berbagai sendi kehidupan manusia, baik dalam aspek ekonomi, dalam aspek politik, dalam aspek budaya, dalam aspek social kemasyarakatan, bahkan dalam aspek pendidikan*⁶. Bahwa globalisasi dikatakan sebagai kolonisasi oleh Mohammad Takdir Ilahi, adalah pandangan yang membenarkan apa yang jauh sebelumnya telah disampaikan oleh Vandana Shiva bahwa *globalisasi adalah dominasi Barat terhadap Dunia Ketiga, dominasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah*⁷.

Menyimak arus dan proses globalisasi di Indonesia, sebagai tatanan yang sangat menekankan hak kebebasan personal seseorang untuk meraih apa yang menjadi kebutuhannya, maka terlihat jelas, bahwa pada satu pihak memang tak dapat disangkal, pengaruh arus dan proses globalisasi telah mengantar bangsa Indonesia pada pertumbuhan dan pengembangan ekonomi, demikian juga pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, pada lain pihak, globalisasi juga telah melahirkan kecendrungan masyarakat Indonesia menjadi sangat individualistis, materialistis dan konsumtif.

Kecendrungan masyarakat Indonesia menjadi individualistis, materialistis dan konsumtif telah menimbulkan adanya persaingan tidak sehat, ketimpangan ekonomi, diskriminasi sosial, dan ketidakadilan demokrasi. Reaksi terhadap keadaan yang demikian

³Giddens, *Jalan Ketiga, Pembaruan Demokrasi Sosial*, 36

⁴Ibid, 36 – 37.

⁵Ibid, 40, 46, 47, 130.

⁶Mohammad Takdir Ilahi, *Nasionalisme Dalam Bingkai Pluralitas Bangsa, Paradigma Pembangunan & Kemandirian Bangsa* (Yogyakarta : AR_ RUZZ MEDIA, 2012), 129.

⁷Vandana Shiva, “ Ecological Balance in an Era of Globalization “ dalam Frank J. Lechhenr & John Boli eds., *The Globalization Reader* (London : Blackwell Publishing, 2004), 422 – 423.

ini, membidani dan melahirkan adanya tindakan radikal, baik dalam bidang keagamaan, ekonomi, dan politik, dari sekelompok masyarakat yang membuat kenyamanan dan kebersamaan hidup di Indonesia menjadi sangat terganggu. Arus dan tatanan globalisasi telah membawa masyarakat Indonesia pada krisis spiritual dan krisis kepribadian bangsa yang sangat mencemaskan. Dengan meminjam istilahnya, Mohammad Takdir Ilahi, arus dan proses globalisasi telah mengantarkan masyarakat Indonesia pada apa yang disebut dengan “gagap spiritual” dan “krisis ideology.”⁸

Sekalipun arus dan tatanan globalisasi di Indonesia berimplikasi seperti tersebut di atas, sampai sekarang beberapa oknum pemerintah, pengusaha, politikus, media massa, masih menyambut globalisasi dengan gegap gempita. Reaksi yang demikian ini mencerminkan bahwa bagi sebagian masyarakat Indonesia, seolah-olah arus dan tatanan globalisasi dipandang sebagai jalan yang harus tetap diikuti tanpa kritis, karena ia akan mengantar Indonesia menggapai apa yang dicita-citakannya yaitu Indonesia yang mensejahtera.

Berangkat dari kenyataan termaksud di atas, nampaknya baik untuk membidik arus globalisasi itu yang menekankan hak kebebasan personal, dari persepektif ideology Indonesia yakni dari nilai-nilai keIndonesiaan sebagaimana tertuang dalam Pancasila, agar bisa disikapi dengan arif arus globalisasi itu demi kesejahteraan bangsa. Hal ini penting dilakukan karena sebagai bangsa Indonesia, kita telah menetapkan nilai-nilai Pancasila yang adalah kristalisasi dari pergumulan dan perjuangan bangsa⁹, dan karakter bangsa yang tidak bisa terpisahkan dari keIndonesiaan¹⁰, sebagai dasar dan sekaligus cita-cita yang menggerakkan dan mengatur kehidupan bersama masyarakat Indonesia menuju masyarakat sejahtera¹¹. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi keIndonesiaan itu adalah: kebebasan, persatuan, kesederajatan, dan kekeluargaan¹².

Arus globalisasi dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi keIndonesiaan, mengindikasikan bahwa arus globalisasi itu, pada satu pihak memang patut dihadapi secara positif, namun pada pihak lain mesti disiasati secara kreatif. Proses globalisasi patut disikapi secara positif karena arus dan proses globalisasi yang menekankan hak kebebasan personal, adalah memang seturut dengan nilai kebebasan yang terkandung dalam Pancasila. Bangsa Indonesia lama hidup dalam ketidakbebasan karena ada dalam dominasi bangsa colonial. Pengalaman ini membuat bangsa Indonesia tiba pada sebuah pemahaman atau nilai bahwa kebebasan adalah hak ekualitas kondisi yang patut dimiliki oleh setiap orang, karena hanya dengan memiliki kebebasan sebagai hak asasi, seseorang bisa mengekspresikan kemanusiaanya secara penuh. Orang yang

⁸Shiva, “Ecological Balance in an Era of Globalization” dalam Frank J. Lechhenr & John Boli eds., *The Globalization Reader*, 129.

⁹Saafroedin Bahar, Nannie Hudawati, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945*, (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998) 84-105.

¹⁰John Titaley, *A Sociohistorical Analysis of The Pancasila as Indonesia's State Ideology in The Light of The Royal Ideology in The Davidic State* (Berkeley California: Graduate Theological Union, 1991) 208.

¹¹Arief Budiman, “Agama, Demokrasi Dan Keadilan, dalam M. Imam Aziz, M. Jadul Maula, Ellyasa KH Dharwis eds., *Agama, Demokrasi Dan Keadilan* (Jakarta: Gramedia, 1993), 24.

¹²Thobias A. Messakh, *Konsep Keadilan Dalam Pancasila* (Salatiga: Satya Wacana University Press, 2007), 45 – 47.

kehilangan kebebasannya adalah orang yang terjajah. Bangsa Indonesia membentuk Negara dengan maksud justru keluar dari penjajahan, guna mendapat kebebasan. Oleh karena itu hakikat dari kehidupan berbangsa dan bernegara, adalah mengaktualisasi dan menikmati kebebasan¹³.

Bahwa arus dan tatanan globalisasi mesti disikapi atau disiasati secara kreatif, karena nilai kebebasan yang terkandung dalam ideology keIndonesiaan, adalah kebebasan yang bertalian erat dengan tiga nilai lain yang juga terbenam dalam Pancasila yaitu : nilai persatuan, nilai kesederajatan, dan nilai kekeluargaan. Bahkan menurut Thobias A. Messakh, keempat nilai Pancasila ini saling mengkarakteristiki atau mengkonstitusi satu dengan yang lain. Artinya, demikian tulis Thobia A. Messakh, nilai persatuan dan kekeluargaan mengkonstitusi nilai kebebasan dan kesederajatan, sehingga kebebasan dan kesederajatan tidak boleh dijiwai oleh egoism atau individualism. Sebaliknya, nilai kebebasan dan kesederajatan mengkonstitusi nilai persatuan dan kekeluargaan, sehingga terhindar dari persatuan dan kekeluargaan yang dijiwai semangat feodalistis – hierarkhis, yaitu persatuan dan kekeluargaan yang warganya tidak memiliki kebebasan dan kesederajatan. Kekeluargaan mengkonstitusi persatuan, kebebasan, dan kesederajatan, sehingga relasi antar masyarakat Indonesia, tidak menjadi relasi yang egoistis, tetapi relasi saling peduli satu dengan yang lain¹⁴.

Bertolak dari kharakter keIndonesiaan seperti terpapar di atas, maka konsep kebebasan yang ingin diwujudkan oleh rakyat Indonesia, dalam rangka menuju Indonesia yang nyaman dan aman, bukan *kebebasan yang berorientasi pada kepentingan diri, tetapi kebebasan yang mempererat persatuan bangsa, kebebasan yang menciptakan kesetaraan diantara sesama anak bangsa, dan kebebasan yang memeliara rasa kekeluargaan sesama anak bangsa*. Kebebasan dalam beragama yang tidak berorientasi pada kesatuan dan persatuan bangsa, kebebasan dalam berekonomi yang tidak membangun kesetaraan ekonomi, dan kebebasan berpolitik yang tidak berasaskan dan juga tidak memeliara rasa kekeluargaan, bukan kebebasan yang Indonesiani, yakni bukan kebebasan yang menapaki jalan yang dibuat Indonesia, sehingga karenanya juga pasti bukan kebebasan yang akan mengantar rakyat Indonesia meraih apa yang dicita citanya yakni Indonesia yang mensejahtera.

Kebebasan beragama dalam rangka mempererat kesatuan bangsa, kebebasan berekonomi dalam rangka menciptakan kesejahteraan bangsa, dan kebebasan berpolitik dalam rangka memproyeksikan dan menegakkan rasa kekeluargaan bangsa, adalah aksi revitalisasi idiologi bangsa. Aksi ini merupakan strategi bangsa, dalam mengatasi arus dan tatanan globalisasi yang selalu menggempur dan menggerus identitas bangsa, serta memporak porandakan arah dan tujuan perjalanan bangsa. Strategi revitalisasi ideology bangsa pada jaman globalisasi ini, nampaknya adalah sebuah metode yang tepat untuk mengendalikan arus dan tatanan globalisasi, agar bangsa Indonesia bisa memperkecil pengaruh buruk globalisasi dan mampu mengoptimalkan dampak konstruktifnya, demi kesejahteraan bangsa. *Bila Indonesia sebagai pengendali globalisasi, dan bukan*

¹³John Titaley, “Hubungan Antar Agama Di Indonesia : Suatu Analysis”, *Kumpulan Artikel 1* (Salatiga : Fakultas Teolgi Universitas Kristen Satya Wacana, Tanpa Tahun), 6.

¹⁴Ibid, 161.

sebaliknya dikendalikan oleh globalisasi, Indonesia tidak akan mengalami krisis identitas dan perjalanan bangsa akan tetap terarah sesuai dengan ideologi bangsa.

Dalam rangka mengaktualisasikan kebebasan beragama yang merawat dan mempererat kesatuan bangsa, semua umat beragama di Indonesia terdorong untuk merumuskan dan menjalankan misi agama yang tidak berpusat dan berorientasi pada kepentingan agama masing-masing secara formal institusional, tetapi justru harus berpusat dan berorientasi pada kepentingan publik, kepentingan bangsa. Sebab sebagaimana diperlihatkan oleh sejarah bahwa, paradigma misi agama yang eksklusif egoistis, beberapa anak bangsa condong berjuang untuk memperkokoh lembaga agama mereka dengan bermacam cara, termasuk dengan cara : mengoreksi, mengerdilkan bahkan menegasikan agama-agama lain. Misi agama yang demikianlah, yakni misi sebuah agama yang berpusat pada kemenangan agamanya dan bukan pada kemenangan kemanusiaan, menjadi pemicu tumbuhnya rasa ketersinggungan, kecurigaan, antipati, persaingan yang tidak sehat, permusuhan, bahkan konflik fisik antara umat beragama di Indonesia, yang sangat mengancam keutuhan bangsa¹⁵.

Misi agama yang berorientasi pada kesejahteraan Indonesia, adalah misi agama yang menjadikan ideology keIndonesiaan berupa “cinta akan kesatuan dan persatuan bangsa “, sebagai asas dari masing masing agama dalam bermisi. Menerapkan moralitas Pancasila yang seperti itu dalam kehidupan beragama, bukan hanya tidak salah karena ” cinta akan kesatuan dan persatuan bangsa “ sesungguhnya adalah nilai dari masing-masing agama yang terakomodir dalam keagamaan Pancasila, tetapi juga sangat praktis. Yaitu membantu semua umat beragama di Indonesia untuk bisa hidup bersatu tanpa kehilangan identitasnya sebagai pemeluk agama tertentu. Dan bisa hidup dalam kebebasan untuk mengekspresikan keyakinan agamanya, tanpa harus menciderai kesatuan dan persatuannya sebagai anak bangsa. Dalam misi agama yang berorientasi pada kesejahteraan Indonesia, yakni pada kesatuan dan persatuan bangsa, masing masing pemeluk agama harus mampu bersikap *inklusif transformatorik*. Artinya masing masing agama mesti memandang agama yang lain sama dengan dirinya, yaitu bersama sama berada dengan segala kekuatan dan kelemahan, secara bersama sama adalah anak anak manusia Indonesia yang dalam pemahaman mereka terhadap kebenaran dan Yang Maha Kuasa itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing masing, sehingga justru untuk memahami dengan baik Yang Maha Kuasa itu, semua agama membutuhkan satu terhadap yang lainnya.¹⁶

Sikap inklusif transformatorik seperti termaksud di atas, akan menolong umat beragama untuk berhenti menganggap keyakinannya adalah mutlak, keyakinan agama lain adalah salah. Sikap inklusif transformatorik akan memacu umat beragama untuk berhenti melihat diri sebagai umat beragama yang harus diperlakukan sebagai anak emas di sebuah

¹⁵E.G. Singgih, “Tema Kerukunan Umat Beragama Di Dalam Diskusi Pakar Agama “, dalam Soegeng Hardiyanto, Martin Lukito Sinaga, Darius Dubut, Sulaiman Manguling, John D. Soeyman, Patmono, eds. *Agama dalam Dialog, Pencerahan, Pendamaian, dan Masa Depan* (Jakarta : BPK Gunung Mula, Cetakan Ketiga, 2003) 36, 42,46, 48. Bandingkan juga Eka Darmaputera, “ Spiritualitas Baru Dan Kepedulian Terhadap Sesama : Suatu Perspektif Kristen “, dalam T. Sumartana, Eka Darmaputera, Djohan Effendi, Daniel Dhakidae, Zulkifly Lubis eds. *Spiritualitas Baru : Agama dan Aspirasi Rakyat* (Yogyakarta : Institute Dian/ Interfidei, 1994), 57.

¹⁶John Titaley, “Urgensi Nilai Nilai Agama Sebagai Perikat Kesatuan dan Persatuan Bangsa Dalam Era Reformasi : Tantangan Dari Masyarakat Indonesia Yang Heterogen “, *Kumpulan Artikel 1* (Salatiga : Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana, Tanpa Tahun), 7.

daerah, hanya karena jumlah warganya adalah mayoritas. Sikap inklusif transformatorik akan membantu masyarakat dan pemerintah, mentiadakan keinginan sebuah agama tertentu, menyalah gunakan otonomi daerah yang adalah kewenangan daerah untuk mengatur kehidupannya sendiri sendiri, menjadi kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah yang didasarkan pada hukum agamanya, hanya karena ia adalah agama mayoritas. Sikap inklusif transformatorik akan menolong pemerintah dan masyarakat untuk meninjau ulang apa yang dibuat oleh sebagian masyarakat Indonesia, dimana pemerintah daerah menjadikan hukum agama tertentu menjadi peraturan daerah. Sikap menganak emaskan satu agama tertentu di negeri ini, akan sangat mengancam kesatuan dan persatuan bangsa¹⁷.

Kebebasan berekonomi yang berkiblat pada kesetaraan ekonomi sesuai dengan jiwa ke Indonesiaan, adalah kebebasan untuk menciptakan kegairahan pembangunan ekonomi, yang tidak didasarkan pada semangat kapitalisme modern, tetapi didasarkan pada semangat egalitarianisme. Yaitu semangat untuk menciptakan kesempatan sama bagi setiap orang untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan sebagai haknya. Roh egalitarianism adalah juga semangat untuk membatasi kebebasan warga dalam pengupayaan perolehan dari sumber sumber penghidupan , bila ternyata pengupayaan yang dilakukannya itu senyatanya merugikan orang banyak¹⁸.

Dalam ekonomi kesederajatan , kita tidak mengijinkan anak bangsa mendominasi, apalagi mengeksploitasi sesama anak bangsa. Dalam ekonomi kesetaraan, yakni ekonomi berbagi, pemerintah wajib secara konseptual melakukan distribusi kekayaan Negara berupa pajak, yang didapat dari masyarakat yang karena hak kebebasan menjadi beruntung , bagi masyarakat yang karena ketidak mampuannya menjadi kurang beruntung seperti: para penyandang cacat, fakir miskin, yatim piatu, para lanjut usia dan para penderita lainnya ¹⁹. Hal ini penting dilakukan oleh Negara, untuk memperkecil kalau belum bisa mentiadakan fakta adanya ketimpangan ekonomi dalam masyarakat Indonesia. Ketimpangan ekonomi yang terjadi pada masyarakat Indonesia telah menyebabkan adanya diskriminasi social.

Bahwa adanya diskriminasi social dalam masyarakat Indonesia yang disebabkan oleh terjadinya ketimpangan ekonomi, sangat kentara sebagaimana ditampilkan oleh fakta social di suatu lingkungan Rukun Tangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Dalam suatu RT atau RW, masing-masing tetangga dan masing-masing warga yang semestinya saling memiliki relasi satu sama lain, dalam kenyataannya hal itu tidak terjadi. Kebanyakan mereka hanya berpenduduk di suatu RT atau RW, bukan berrelasi. Relasi yang mereka buat dan jalin bukan bergaul dekat dengan tetangga, tetapi dengan beberapa orang yang nun jauh disana yang sekelas dengan mereka, yang sekeyakinan, dan yang memiliki kepentingan kelompok..

¹⁷ Titaley, "Urgensi Nilai Nilai Agama Sebagai Perekat Kesatuan dan Persatuan Bangsa Dalam Era Reformasi, 5.

¹⁸ Taufik Abdullah, " Tesis Weber dan Islam di Indoesia " dalam Taufik Abdullah, ed. *Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekono* (Jakarta : Penerbit LP3ES bekerjasama dengan Yayasan Obor dan LEKNAS – LIPI, cetakan ke lima, 1993), 7-9.

¹⁹ Djohan Effendi, " Menyimak Pesan Abadi Para Pembawa Agama " , dalam Jimmy Oentoro, *Indonesia Satu, Indonesia Beda, Indonesia Bisa, Membangun Bhinneka Tunggal Ika Di Bumi Nusantara*, (Jakarta : Harvest Publication House, 2010) 148

Ketimpangan ekonomi dan diskriminasi social dalam sebuah masyarakat, seperti yang terjadi dalam masyarakat Indonesia sebagaimana terpapar di atas, yang sebenarnya bukan merupakan mimpi bangsa, menurut Anthony Giddens, adalah merugikan dirinya sendiri, sebab hal itu adalah pemicu ketidak nyamanan masyarakat ²⁰. Peringatan Anthony Giddens ini telah menjadi kenyataan di Indonesia. Ketimpangan ekonomi dan diskriminasi social banyak kali telah menjadi akar dan penyulut tindakan radikal dari sekelompok masyarakat, berupa perampasan, penjarahan dan pemusnahan property dari mereka yang diduga menjadi penyebab adanya diskriminasi social. Tindakan radikal yang demikian ini, mestinya menjadi peringatan korektif dan introspektif diri bagi pemerintah dan semua masyarakat Indonesia, untuk menggerakkan roda perekonomian yang sesuai dengan karakter bangsa, yakni *perekonomian yang berasaskan kebebasan namun berorientasi pada kesetaraan*.

Perekonomian yang berasaskan kebebasan namun berorientasi pada kesetaraan yang adalah ideology Indonesia, bercita cita untuk mengantar Indonesia menjadi bangsa yang berkeadilan. Oleh karena begitu tujuan bangsa ini, maka semua komponen bangsa terpanggil untuk mengendalikan keinginan diri, mengatasi keserakahan diri, dan memperlakukan setiap orang dengan adil ²¹. Dalam mengendalikan keinginan diri, kita tidak patut mengumpulkan harta sebanyak yang kita bisa kumpulkan dari tanah dan air Indonesia, sampai sesame tidak lagi dapat kebagian apapun. Dalam mengatasi keserakahan diri, kita tidak patut melaksanakan korupsi dan juga tidak patut bersikap toleran terhadap para koruptor. Dalam memperlakukan setiap orang dengan adil dalam dunia ekonomi Indonesia, kita tidak patut hidup hanya untuk diri sendiri saja. Kita perlu hidup berbagi sebab tanah dan air Indonesia dipersembahkan oleh Yang Maha Kuasa sebagai sumber penghidupan, bagi semua orang yang Indonesia adalah tanah air mereka.

Karena arus dan pengaruh globalisasi, dalam dunia ekonomi Indonesia terjadi sebuah fenomena di Bali, yang mana sekarang dalam persektif idiologi keIndonesiaan, fenomena itu semestinya ditiadakan. Fenomena termaksud ialah sebagai berikut : Ada beberapa pantai di Bali, tidak bisa dipakai lagi oleh masyarakat umum untuk lalu lalang, berenang, apalagi untuk menangkap ikan, karena pantai itu adalah view hotel. Pemilik hotel mengkemas pantai pantai itu sedemikian rupa, seolah olah pantai itu adalah milik hotel. Dalam hal ini panggilan untuk hidup berbagi ditiadakan, kedaulatan rakyat juga dimatikan hanya untuk kehidupan ekonomi pemilik modal. Tidak terjadi kesetaraan, yang terjadi justru dominasi dimana yang kuat menindas yang lemah. *Berangkat dari kenyataan ini, maka dalam rangka mensiasati arus dan pengaruh globalsasi, dari idiologi Indonesia, kita perlu mendesain pola pariwisata yang tidak mematikan kedaulatan rakyat, tetapi yang menciptakan kehidupan berbagi. Sebagai contoh misalnya daripada membangun hotel hotel yang mewah ditempat tempat tertentu, lebih baik mengupayakan desa desa di seluruh Bali menjadi daerah yang layak sebagai tempat tinggal para tourist selama berlibur di Bali.*

Mengenai kebebasan berpolitik yang memproyeksikan dan memelihara rasa kekeluargaan, dapat diatakan bahwa kita terpanggil untuk boleh memiliki kuasa, namun

²⁰Giddens, *Jalan Ketiga, Pembaruan Demokrasi Sosial*, 47-48.

²¹Ibid, 149.

kuasa itu untuk melayani. Dalam kuasa yang melayani, kita mesti memperlakukan orang lain sebagaimana kita menghendaki orang lain memperlakukan kita. Dalam berpolitik seperti itu kita terlatih untuk berdemokrasi secara dewasa, siap cekcok dalam diskusi menuju musyawarah mufakat justru karena kita cocok sama sama sebagai anggota keluarga besar Indonesia. Dalam berpolitik yang demikian, ada keterbukan dan pengertian. Sedangkan dusta, tipu muslihat dan permusuhan tidak ada di dalamnya. Kebebasan berpolitik yang memproyeksikan dan memelihara rasa kekeluargaan, adalah kebebasan untuk meraih kuasa yang diperuntukkan sebagai jalan melebur diri demi keamanan dan kenyamanan masyarakat²².

Para Pendiri bangsa telah mempraktekkan kebebasannya dalam berpolitik yang dijiwai oleh rasa kekeluargaan dan diperuntukkan demi kekeluargaan. Kebebasan berpolitik yang demikian, sarat dengan kerelaan untuk berkorban karena rasa berkeluarga dan demi untuk keluarga. Kebebasan berpolitik yang dijiwai oleh rasa kekeluargaan dan dipersembahkan demi kekeluargaan, sebagaimana telah diperbuat oleh para Pendiri bangsa, sama sekali tidak mengandung motivasi dan aksi yang mengorbankan sesama anggota keluarga. Kebebasan berpolitik yang demikianlah yang membuat kita bisa mewarisi Indonesia dengan keIndonesiaannya.

Kebebasan berpolitik yang kini semarak pada jaman globalisasi ini, dimana banyak masyarakat melihat kuasa itu bisa dibeli dan bisa dijual, membuat banyak masyarakat kehilangan rasa kekeluargaan dalam berpolitik. Ada banyak ketidak terbukaan, tidak sedikit ada tipu muslihat dan dusta, ada cukup banyak permusuhan dan dendam di hati masyarakat dalam berpolitik. Hal itu terjadi demikian karena rasa dan jiwa kekeluargaan sebagai bangsa telah tergantikan oleh kepentingan kelompok dan golongan. Adanya tindakan kekerasan dan bukan merangkul ketika ada konflik, adanya tindakan pembiaran ketika ada kejadian di depan mata yang senyatanya bertentangan dengan ideologi bangsa, adanya kegamangan yang semestinya diperlukan kalimat yang lugas dan tindakan yang tegas dalam menyikapi sebuah realita, merupakan idikasi bahwa kebebasan politik kita adalah kebebasan meraih kuasa untuk menerapkan prinsip menang kalah.

Kebebasan berpolitik masyarakat kita pada era globalisasi seperti termaksud di atas, jelas harus digerus, digusur dan digantikan dengan kebebasan berpolitik yang berjiwa kekeluargaan dan berorientasi pada keutuhan bangsa sebagai keluarga nasional kita. *Kebebasan berpolitik yang berbasis rasa kekeluargaan tidak menerapkan prinsip kalah menang dalam berdemokrasi. Tidak melakukan intimidasi namun merangkul masyarakat dalam menangani konflik, tidak melakukan pembiaran dan tidak bersikap gamang bila kekeluargaan bangsa terancam.*

Penutup

Idiologi Indonesia layak menjadi control terhadap arus globalisasi. Walaupun pemahaman dan penghayatan kita akan idiologi bangsa masih jauh dari sempurna, kita tidak boleh menyerah dalam mengendalikan arus dan pengaruh globalisasi yang sedang

²²Giddens, *Jalan Ketiga, Pembaruan Demokrasi Sosial*, 143.

mendatangi kita. Membayangkan dampak negative dari globalisasi yang begitu destruktif bila tidak disiasati secara kreatif oleh nilai nilai Pancasila, maka salah satu upaya yang paling tepat adalah melakukan revitalisasi Pancasila. Revitalisasi Pancasila bertujuan untuk memperkokoh identitas diri dan juga sekaligus memantapkan jalan yang telah kita buat bersama, untuk menggapai Indonesia sejahtera. Dengan merevitalisasi Pancasila kita akan menjadi bangsa, yang tidak mudah tergerus oleh nilai nilai yang walau nampaknya menyenangkan sesaat, namun tidak bermanfaat bahkan menyesatkan untuk jangka waktu yang panjang. Dalam membidik arus globalisasi dari perspektif ideologi Indonesia, kita menemukan bahwa dalam rangka membangun masyarakat sejahtera, ternyata nilai nilai Pancasila berperan sebagai filter dan sekaligus katalisator, terhadap berbagai nilai yang datang menghampiri kita. Bisa diprediksi, bahwa dengan berbekal nilai-nilai Indonesiani sebagaimana terkandung dalam Pancasila, dan bila bekal itu dihayati secara konsisten oleh semua komponen bangsa, bangsa Indonesia tidak mustahil akan bisa menjadi bangsa yang hebat di suatu hari nanti.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, Arief. “Agama, Demokrasi Dan Keadilan, dalam M . Imam Aziz, M. Jadul Maula, Ellyasa KH Dharwis eds. , *Agama, Demokrasi Dan Keadilan*. Jakarta : Gramedia, 1993.
- Bahar, Saafroedin, Nannie Hudawati. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 –22 Agustus 1945*., Jakarta : Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998
- Effendi, Djohan. “ Menyimak Pesan Abadi Para Pembawa Agama “, dalam Jimmy Oentoro, *Indonesia Satu, Indonesia Beda, Indonesia Bisa, Membangun Bhinneka Tunggal Ika Di Bumi Nusantara*,(Jakarta : Harvest Publication House, 2010
- Giddens, Anthony. *Jalan Ketiga, Pembaruan Demokrasi Sosial*. Jakarta : Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2002
- Ilahi, Mohammad Takdir. *Nasionalisme Dalam Bingkai Pluralitas Bangsa, Paradigma Pembangunan & Kemandirian Bangsa*. Yogyakarta : AR _ RUZZ MEDIA, 2012
- Titaley, John. “Hubungan Antar Agama Di Indonesia : Suatu Analysis”, *Kumpulan Artikel 1*. Salatiga : Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana, Tanpa Tahun
- _____, “Urgensi Nilai Nilai Agama Sebagai Perekat Kesatuan dan Persatuan Bangsa Dalam Era Reformasi : Tantangan Dari Masyarakat Indonesia Yang Heterogen “, *Kumpulan Artikel 1*. Salatiga : Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana, Tanpa Tahun
- _____, *A Sociohistorical Analysis of The Pancasila as Indonesia’s State Ideology in The Light of The Royal Ideology in The Davidic State*. Berkeley California : Graduate Theological Union, 1991. 208.
- Shiva, Vandana. “ Ecological Balance in an Era of Globalization “ dalam Frank J. Lechhenr & John Boli eds., *The Globalization Reader*. London : Blackwell Publishing, 2004
- Hardiyanto, Soengeng Martin Lukito Sinaga dan lainnya. *Agama dalam Dialog, Pencerahan, Pendamaian, dan Masa Depan*. Jakarta : BPK Gunung Mula, Cetakan Ketiga, 2003
- Abdullah, Taufik. “Tesis Weber dan Islam di Indoesia “ dalam Taufik Abdullah, ed. *Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekono*. Jakarta : Penerbit LP3ES bekerjasama dengan Yayasan Obor dan LEKNAS – LIPI, cetakan ke lima, 1993
- Messakh, Thobias A. *Konsep Keadilan Dalam Pancasila*. Salatiga : Satya Wacana University Press, 2007